# POHON KINERJA
# DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
# KABUPATEN KEBUMEN

**ULTIMATE OUTCOME (Hasil Akhir)**

**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata serta Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**
- meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- meningkatnya kualitas dan akses perlindungan sosial;
- meningkatnya kesetaraan, pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan;
- meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

**INTERMEDIATE OUTCOME (Hasil Antara)**

**Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial**
- meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;
- meningkatnya cakupan perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial;
- meningkatnya kemandirian PPKS dan kelompok rentan.

**Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Aktivitas Pembangunan**
- meningkatnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki;
- menguatnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

**Meningkatnya Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dan Deskriminasi**
- meningkatnya pemenuhan hak anak;
- menurunnya risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi terhadap anak;
- meningkatnya efektivitas layanan perlindungan khusus anak.

**IMMEDIATE OUTCOME (Hasil Langsung)**

| Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial | Meningkatnya Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Meningkatnya layanan PMKS di Luar Panti | Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • korban migran teridentifikasi dan memperoleh layanan sesuai kebutuhan;<br>• korban memperoleh pendampingan, pemulangan/rujukan dan pemulihan;<br>• penanganan korban berlangsung cepat dan terpadu. | • korban bencana memperoleh pertolongan dan bantuan sesuai kebutuhan;<br>• evakuasi, perlindungan dan pemulihan korban terlaksana;<br>• kesiapsiagaan penanganan bencana meningkat. | • kompetensi SDM kesejahteraan sosial meningkat;<br>• SDM memiliki kapasitas sesuai kebutuhan pelayanan;<br>• profesionalisme dan kualitas pelayanan sosial meningkat. | • cakupan penerima perlindungan/jaminan sosial meningkat;<br>• bantuan lebih tepat sasaran, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu;<br>• kesalahan sasaran dan duplikasi penerima dapat ditekan. | • PPKS memperoleh asesmen dan pelayanan sesuai kebutuhan;<br>• PPKS memperoleh rehabilitasi, pendampingan dan rujukan;<br>• PPKS yang potensial memperoleh pemberdayaan menuju kemandirian. | • kondisi sarana dan lingkungan Taman Makam Pahlawan terpelihara;<br>• pelayanan kunjungan dan penghormatan berjalan baik;<br>• pengelolaan TMP memenuhi standar dan ketentuan. | • dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan berkualitas;<br>• pelaksanaan program dan anggaran terkendali;<br>• evaluasi dan pelaporan kinerja terlaksana serta ditindaklanjuti. |

| Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan | Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan | Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Terjaminnya Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak |
|---|---|---|---|---|---|
| • PUG terlembaga dalam perencanaan dan penganggaran;<br>• kapasitas dan partisipasi perempuan meningkat;<br>• akses perempuan terhadap sumber daya, ekonomi dan pembangunan meningkat. | • pencegahan kekerasan terhadap perempuan diperkuat;<br>• korban memperoleh pengaduan, pendampingan, perlindungan dan pemulihan;<br>• penanganan kasus berlangsung terpadu dan berperspektif korban. | • kapasitas pengasuhan dan ketahanan keluarga meningkat;<br>• keluarga mampu menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga;<br>• peran serta keluarga dalam pembangunan meningkat. | • data gender dan anak tersedia, akurat dan mutakhir;<br>• data terintegrasi dan dapat dipertukarkan/dimanfaatkan;<br>• data digunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran dan evaluasi. | • hak sipil dan identitas anak terpenuhi;<br>• akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan lingkungan yang aman meningkat;<br>• partisipasi anak dalam pembangunan meningkat. | • pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak meningkat;<br>• anak korban memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi dan rujukan;<br>• penanganan kasus anak terlaksana cepat, terpadu dan berkelanjutan. |

**OUTPUT (Hasil Keluaran)**

| Layanan perlindungan dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan<br>• asesmen dan pendampingan korban;<br>• fasilitasi rujukan/pemulangan korban;<br>• pemulihan sosial korban;<br>• monitoring dan tindak lanjut pascapemulangan. | Layanan penanganan korban bencana alam dan sosial<br>• pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;<br>• perlindungan kelompok rentan di lokasi bencana;<br>• pendataan dan identifikasi korban serta kerugian/dampak sosial;<br>• dukungan pemulihan sosial dan psikososial;<br>• monitoring dan tindak lanjut pascabencana. | Peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial<br>• sertifikasi dan pengembangan kompetensi SDM kesejahteraan sosial;<br>• penguatan kapasitas dalam asesmen, pendampingan, dan penanganan PPKS;<br>• pengembangan jejaring dan koordinasi antar-SDM/penyelenggara layanan sosial;<br>• supervisi dan pembinaan berkelanjutan;<br>• monitoring dan evaluasi kualitas kinerja SDM layanan. | Perlindungan dan jaminan sosial tepat sasaran<br>• pemutakhiran data penerima bantuan sosial;<br>• verifikasi dan validasi usulan penerima bantuan sosial;<br>• fasilitasi bantuan/jaminan sosial;<br>• penanganan pengaduan dan permasalahan penerima bantuan sosial;<br>• evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi data penerima bantuan sosial. | Layanan PMKS/PPKS di luar panti<br>• asesmen penjangkauan dan penanganan PPKS;<br>• pendampingan dan rujukan;<br>• pemberian bantuan sosial dan/atau stimulan;<br>• reintegrasi sosial dan pemulihan keberfungsian sosial;<br>• monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut layanan. | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan<br>• perawatan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan;<br>• pemeliharaan makam, prasasti, dan fasilitas pendukung;<br>• pelaksanaan upacara dan kegiatan penghormatan kepada pahlawan;<br>• pendataan dan pemutakhiran informasi makam/pahlawan;<br>• monitoring dan evaluasi kondisi serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan. | Dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas.<br>• penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;<br>• pengendalian dan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan;<br>• penyelarasan perencanaan, penganggaran dan kinerja;<br>• penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban tepat waktu;<br>• tindak lanjut hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja. |
|---|---|---|---|---|---|---|

| PUG dan pemberdayaan perempuan<br>• penguatan kelembagaan PUG;<br>• peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan;<br>• penguatan akses ekonomi dan perlindungan hak perempuan;<br>• penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG);<br>• monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dan pemberdayaan perempuan. | Perlindungan perempuan terpadu<br>• asesmen dan identifikasi kebutuhan korban;<br>• fasilitasi layanan kesehatan, psikologis, sosial, dan bantuan hukum;<br>• rujukan dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait;<br>• perlindungan dan pemenuhan hak korban;<br>• reintegrasi sosial dan pemberdayaan korban;<br>• monitoring dan tindak lanjut pascalayanan. | Penguatan kualitas keluarga dalam pembangunan<br>• peningkatan pemahaman keluarga tentang perlindungan perempuan dan anak;<br>• penguatan komunikasi dan relasi positif dalam keluarga;<br>• pencegahan perkawinan anak dan berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga;<br>• peningkatan partisipasi keluarga dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial;<br>• penguatan jejaring dan kelembagaan keluarga;<br>• monitoring dan evaluasi kualitas dan ketahanan keluarga. | Pengelolaan sistem data gender dan anak<br>• penyusunan dan pengelolaan data terpilah gender dan anak;<br>• pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi data gender dan anak;<br>• peningkatan kualitas, akurasi, dan konsistensi data;<br>• analisis dan pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan;<br>• diseminasi dan penyediaan informasi data gender dan anak;<br>• monitoring dan evaluasi pengelolaan data. | Pemenuhan Hak Anak<br>• perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;<br>• pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi anak;<br>• penguatan lingkungan yang aman dan ramah anak;<br>• penguatan kelembagaan dan jejaring pemenuhan hak anak;<br>• peningkatan kapasitas forum/kelompok partisipasi anak;<br>• monitoring dan evaluasi pemenuhan hak anak. | Perlindungan khusus anak<br>• asesmen dan identifikasi kebutuhan anak korban;<br>• fasilitasi layanan kesehatan, psikologis, sosial, pendidikan, dan bantuan hukum;<br>• pemulihan dan rehabilitasi anak korban;<br>• reintegrasi sosial dan reunifikasi keluarga;<br>• perlindungan dan pemenuhan hak anak selama proses penanganan;<br>• monitoring dan tindak lanjut pascapenanganan. |
|---|---|---|---|---|---|

**CSF (Critical Success Factor)**

| • Data dan identifikasi korban akurat;<br>• koordinasi lintas sektor/jejaring rujukan;<br>• respons layanan cepat;<br>• SDM pendamping kompeten. | • Kesiapsiagaan dan SOP tanggap bencana;<br>• ketersediaan logistik;<br>• koordinasi lintas sektor;<br>• SDM/relawan terlatih. | • Peta kebutuhan kompetensi;<br>• SDM pelatih/narasumber kompeten;<br>• akses pelatihan berkelanjutan;<br>• evaluasi kompetensi. | • Data sasaran valid dan mutakhir;<br>• verifikasi tepat sasaran;<br>• ketepatan penyaluran;<br>• koordinasi dengan desa/kelurahan dan instansi terkait. | • Asesmen kebutuhan tepat;<br>• layanan terpadu dan sesuai jenis masalah;<br>• jejaring rujukan aktif;<br>• pemberdayaan berkelanjutan. | • Sarana prasarana memadai;<br>• pemeliharaan rutin;<br>• pengelolaan sesuai standar;<br>• dukungan anggaran. | • Komitmen pimpinan;<br>• data kinerja valid;<br>• SDM perencana kompeten;<br>• pengendalian dan evaluasi berkala;<br>• tindak lanjut hasil evaluasi. |
|---|---|---|---|---|---|---|

| • Komitmen PUG;<br>• data terpilah gender;<br>• kapasitas perempuan meningkat;<br>• akses sumber daya dan pasar;<br>• dukungan kebijakan responsif gender. | • Kesadaran masyarakat;<br>• layanan aman dan responsif;<br>• SDM pendamping profesional;<br>• sistem rujukan terintegrasi;<br>• SOP dan regulasi jelas. | • Kapasitas keluarga;<br>• akses layanan dasar;<br>• pola pengasuhan positif;<br>• partisipasi masyarakat;<br>• sinergi lintas sektor. | • Standar data jelas;<br>• sistem informasi memadai;<br>• SDM pengelola kompeten;<br>• keamanan data;<br>• pemanfaatan data optimal. | • Komitmen pemenuhan hak anak;<br>• akses layanan dasar;<br>• keluarga dan lingkungan mendukung;<br>• partisipasi anak;<br>• kelembagaan KLA berfungsi. | • Sistem perlindungan anak terpadu;<br>• SDM layanan profesional;<br>• layanan terintegrasi;<br>• jejaring rujukan;<br>• respons cepat terhadap kasus. |
|---|---|---|---|---|---|

**Crosscutting**

| 1. Disnakertrans : Penelusuran warga negara migran korban tindak kekerasan<br>2. Migran Care : Pendampingan korban dalam proses pemulangan | 1. BPBD : sebagai koordinator dalam assesmen pada setiap layanan kebencanaan dan rencana tindak lanjut penanganan korban bencana yang terjadi<br>2. PMI : sebagai relawan pada penanganan bencana di bidang kesehatan, air bersih, tenaga relawan dapur umum dan logistik<br>3. Dinkes PPKB : sebagai penyedia layanan kesehatan<br>4. Kecamatan : Fasilitasi lumbung sosial<br>5. Desa/kel : Memberikan laporan/informasi terkait kejadian bencana di wilayahnya dan memfasilitasi usulan permohonan dan pertanggungjawaban bantuan logistik dan keuangan | 1. OPD dan Lembaga swasta: Fasilitasi peningkatan kapasitas Karangtaruna kabupaten & kecamatan, PSM.<br>2. Psikolog, BAZNAS, Kepolisian, LBH dan Lembaga lainnya: Peningkatan kapasitas SDM LK3. | 1. Pemdesa/Kel: mengusulkan pembaharuan DTSEN dan usulan bansos.<br>2. Kemensos RI: Finalisasi pembaharuan DTSEN dan usulan bansos.<br>3. Disdukcapil: Pemadanan data kependudukan calon penerima manfaat bansos<br>4. Dinkes PPKB: Rekomendasi usulan KIS APBD.<br>5. Disnaker dan Distapang: Mengusulkan calon penerima BLT DBHCHT<br>6. Pendamping Sosial: Mengusulkan calon siswa SR | 1. Desa/Kelurahan: Koordinasi Permohonan Bansos APBD<br>2. Kecamatan: Koordinasi Surat Permohonan Bansos APBD dari tiap Desa/Kelurahan.<br>3. Disdukcapil: Verifikasi NIK<br>4. Pendamping PKH: Pendampingan Asesmen Lapangan<br>5. Dinkes PPKB: Cek Kesehatan PMKS/PPKS<br>6. Dinsos Prov. Jateng: Rujukan ke Panti Prov. | 1. DLHKP: Pengamanan aset dan kebersihan taman makam pahlawan.<br>2. KODIM, Polres, Satpol PP, Kesbangpol: Koordinasi dalam pelaksanaan Hari Besar Nasional di TMP.<br>3. Kemensos RI: Penerbitan Juknis Pelaksanaan Hari Pahlawan | 1. Bapperida: Koordinasi perencanaan program dan kegiatan<br>2. BPKPD: Koordinasi pelaksanaan penganggaran program dan kegiatan<br>3. Bagian Organisasi: Koordinasi manajemen kinerja<br>4. Bagian Tata Pemerintahan: Koordinasi pelaporan kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Bappreida : Ketua Pokja PUG<br>2. BPKPD : Mengalokasikan anggaran untuk PUG<br>3. Semua OPD : Menganggarkan ARG (Anggaran Responsive Gender)<br>4. DWP dan GOW: Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan<br>5. Kecamatan/Desa : Fasilitasi kegiatan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan | 1. Dinas PMD : Pembentukan RPPA Kecamatan Berdaya<br>2. Kecamatan : Pembentukan FPPA<br>3. Desa/Kelurahan : Pembentukan KPPAD / KPPAK<br>4. Polres : Gelar kasus kekerasan perempuan | 1. PUSPA : Konseling peningkatan kualitas keluarga<br>2. Dinkes PPKB : Kegiatan ketahanan keluarga | 1. Bapperida : Penyesuaian data<br>2. Diskominfo : Pengelolaan data dan publikasi data<br>3. Disarpus : Pengelolaan data dan publikasi data<br>4. BPS : Penyajian data<br>5. Ormas : Penyaji data<br>6. Dunia Usaha : Penyaji Data<br>7. Rutan : Penyaji Data<br>8. Organisasi Olahraga : Penyaji Data<br>9. OPD : Penyaji Data | 1. Kecamatan : Kecamatan Layak Anak<br>2. Desa/Kelurahan : Desa Layak Anak<br>3. Forum Anak : Melibatkan anak dalam perencanaan pembangunan<br>4. Seluruh OPD : Mendukung cluster Kabupaten Layak Anak | 1. Kecamatan : Pembentukan FPPA<br>2. Desa/Kelurahan : Pembentukan KPPAD / KPPAK<br>3. Polres : Gelar kasus kekerasan perempuan |
|---|---|---|---|---|---|

**PROSES (Enabler/Faktor Pendorong)**

| • SOP penanganan dan rujukan;<br>• koordinasi dengan instansi terkait;<br>• penguatan kapasitas petugas;<br>• pemutakhiran data kasus. | • Penyusunan rencana kontinjensi;<br>• pemetaan risiko dan kebutuhan;<br>• penguatan jejaring kebencanaan;<br>• simulasi dan pemantauan kesiapsiagaan. | • Identifikasi kebutuhan pelatihan;<br>• penyusunan kurikulum/materi;<br>• fasilitasi pelatihan dan sertifikasi;<br>• monitoring penerapan kompetensi. | • Pemadanan data kependudukan dan sosial;<br>• verifikasi lapangan;<br>• pengendalian penyaluran;<br>• pemutakhiran data berkala. | • Identifikasi dan asesmen PPKS;<br>• penyusunan rencana intervensi;<br>• koordinasi layanan/rujukan;<br>• monitoring pascapelayanan. | • Penyusunan rencana pemeliharaan;<br>• pemeriksaan kondisi sarana;<br>• pelaksanaan pemeliharaan berkala;<br>• pengawasan dan evaluasi. | • Pengumpulan dan analisis data kinerja;<br>• koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;<br>• monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja;<br>• penyusunan tindak lanjut perbaikan kinerja. |
|---|---|---|---|---|---|---|

| • Penguatan kelembagaan PUG;<br>• analisis gender dalam perencanaan;<br>• pelatihan/pemberdayaan perempuan;<br>• koordinasi lintas sektor. | • Sosialisasi pencegahan kekerasan;<br>• penguatan layanan pengaduan;<br>• koordinasi rujukan korban;<br>• pendampingan dan monitoring kasus. | • Edukasi pengasuhan dan ketahanan keluarga;<br>• fasilitasi layanan keluarga;<br>• pemberdayaan ekonomi keluarga;<br>• penguatan jejaring masyarakat. | • Pengumpulan data terpilah;<br>• validasi dan pemutakhiran berkala;<br>• integrasi antar sumber data;<br>• analisis dan penyajian informasi. | • Penguatan Kabupaten Layak Anak;<br>• koordinasi layanan dasar anak;<br>• forum/partisipasi anak;<br>• pemantauan pemenuhan hak anak. | • Penguatan UPTD PPA dan layanan rujukan;<br>• pencegahan kekerasan anak;<br>• asesmen dan pendampingan kasus;<br>• monitoring tindak lanjut. |
|---|---|---|---|---|---|

Keterangan : ➡ Hubungan Sebab Akibat ⇢ Mempengaruhi/Mendukung